

IMPLEMENTASI SISTEM INFORMAS MANAJEMEN DAERAH (SIMDA) TERHADAP PELAPORAN KEUANGAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN KUTAI BARAT

Arniati A. DG. Mamang¹, Titin Ruliana², Ivana Nina Esterlin Barus³
Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
Email : arniaty93@gmail.com

Keywords :

Regional Manajemnt Infomation System (SIMDA), Regional Financial Manajemnt, Government Accounting Standards

ABSTRACT

This study is to discuss the Implementation of Regional Management Information Systems (SIMDA) in the Department of Manpower and Transmigration in West Kutai Regency as one of the assistants in carrying out financial management and accountability to the government. The analysis used is the suitability of financial management and financial reporting based on applicable government regulations. The method used is a qualitative research method.

The implementation of the Regional Management Information System (SIMDA) as a helper software in financial management has been implemented optimally but it is necessary to supervise the use of the system by the leadership so that financial management and financial reporting have more high accountability and avoid deviant or inappropriate things with the prevailing laws and regulations in the implementation of financial management main duties and fctions in accordance with the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 58 of 2005 concerning Regional Financial Management.

The implementation of the Regional Management Information System (SIMDA) as a supporting software in the accountability of the preparation of financial statements has been implemented maximally in accordance with the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 71 of 2010 concerning Government Accounting Standards.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat, tentunya telah memberikan pengaruh terhadap sistem pengolahan data dan sistem informasi pada entitas dalam memenuhi kewajibannya melaksanakan pengelolaan keuangan dan pelaporan keuangan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dengan teknologi yang lebih mutakhir. Aplikasi dan software sistem informasi yang terintegrasi, dapat diandalkan, cepat dan akurat, Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dirilis oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang digunakan untuk melakukan pengolahan data keuangan secara

efektif dan efisien dalam rangka membantu daerah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan dan pelaporan keuangannya secara terintegrasi menurut Machmud (2013 : 410) Sistem Informasi Manajemen adalah : Suatu sistem yang dapat membantu manajemen di dalam pengumpulan data, pengolahan serta analisis evaluasi data dan menyajikan ke dalam batas informasi yang bernilai dan akhirnya sampai pada pengambilan keputusan di mana informasi ini berguna untuk mendukung fungsi operasi manajemen.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Barat telah menerapkan SIMDA sejak tahun 2007. Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) pada suatu Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) selalu memiliki kendala-kendala tersendiri dalam proses implementasi sistem informasi manajemen daerah ini dalam pemenuhan kewajiban daerah dalam menjalankan pengelolaan keuangan dan mempertanggungjawabkan laporan keuangannya, menurut Budiman, dkk. (2013) menyatakan bahwa: Aplikasi SIMDA merupakan aplikasi database yang bertujuan untuk mempermudah pengelolaan keuangan daerah di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)”. Aplikasi SIMDA dikembangkan dengan memperhatikan dan mengimplementasikan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Oleh sebab itu pengendalian terhadap aplikasi menjadi suatu keharusan untuk menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam mengimplementasikan aplikasi SIMDA untuk menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Barat sebagai sistem utama dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dan pelaporan keuangannya di tahun 2017 telah diperiksa oleh pihak Inspektorat Daerah yang menilai kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi termasuk kebijakan, prosedur, dan arahan pimpinan instansi pemerintah yang diperiksa, telah ditemukan beberapa kebijakan dalam pengelolaan keuangan yang belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, meliputi pemeriksaan kas (kas opname), dan inventarisir aset yang merupakan salah satu unsur dari daftar aset satuan kerja pemerintah daerah (SKPD). Beberapa temuan adalah mengarah kepada pelayanan dan teknis lainnya.

Laporan keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Barat selama tahun 2016 dan tahun 2017 belum pernah dilakukan audit, yang semestinya dilakukan untuk pengujian kepatuhan dan kewajaran terhadap pelaporan keuangan yang menjadi pertanggungjawaban dinas tersebut kepada pemerintah.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini mengkaji dan menguji tentang kontribusi penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) oleh

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Barat terhadap pengelolaan keuangan daerah sampai dengan pelaporan keuangannya, kesesuaian pengelolaan dan pelaporan keuangan tersebut dengan standar pengelolaan dan pelaporan keuangan yang berlaku berdasarkan Peraturan Pemerintah, dengan judul “Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah Terhadap Pelaporan Keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Barat”.

Adapun tujuan tugas akhir ini adalah untuk menganalisis pengelolaan keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Barat terhadap kesesuaiannya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan menganalisis pelaporan keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Barat apakah telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Akuntansi sektor publik menurut *International Public Sector Accounting Pronouncements* (2016) menyatakan bahwa: “*The primary objective of most public sector entities is to deliver services to the public, rather than to make profits and generate a return on equity to investors. Consequently the performance of such entities can be only partially evaluated by examination of financial position, financial performance and cashflows. GPFs provide information to users for accountability and decision-making purposes*”. Akuntansi Sektor Publik menurut Nordiawan (2008:1) adalah: “Proses pencatatan, pengklasifikasian, penganalisisan dan pelaporan transaksi keuangan dari suatu organisasi publik yang menyediakan informasi keuangan bagi para pemakai laporan keuangan yang berguna untuk pengambilan keputusan”.

Menurut *American Institute of Certified Public Accountants* (AICPA) yang dikutip oleh Suhayati, dkk. (2009:1) menyatakan bahwa:” Akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan dan peringkasan transaksi dan kejadian yang bersifat keuangan dengan cara yang berdaya guna dan dalam bentuk satuan uang dan penginterpretasian hasil proses tersebut”. Menurut Ismail (2010:2) menyatakan bahwa: “Akuntansi dapat diartikan sebagai seni dalam melakukan pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran, yang mana hasil akhirnya tercipta sebuah informasi seluruh aktivitas keuangan perusahaan. Tujuan akuntansi yang digambarkan dalam laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan para pemakai”.

Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)

Menurut Machmud (2013 : 410) Sistem Informasi Manajemen adalah : “Suatu sistem yang dapat membantu manajemen di dalam pengumpulan data, pengolahan serta analisis evaluasi data dan menyajikan ke dalam batas informasi yang bernilai dan akhirnya sampai pada pengambilan keputusan di mana informasi ini berguna untuk mendukung fungsi operasi manajemen”. Menurut Budiman, dkk. (2013) menyatakan bahwa: “Aplikasi SIMDA merupakan aplikasi database yang bertujuan untuk mempermudah pengelolaan keuangan daerah di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)”. Aplikasi SIMDA dikembangkan dengan memperhatikan dan mengimplementasikan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Oleh sebab itu pengendalian terhadap aplikasi menjadi suatu keharusan untuk menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam mengimplementasikan aplikasi SIMDA untuk menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)”.

Menurut Erlina (2008:18) : “laporan keuangan adalah produk akhir dari proses akuntansi yang telah dilakukan. Laporan Keuangan yang disusun harus memenuhi prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005”.

Menurut Nordiawan, dkk. (2008:294) mendefinisikan laporan keuangan adalah: “Laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum pelaporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan serta realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya”.

METODE

Penelitian ini dilakukan di Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Barat, dan Penelitian ini di fokuskan pada Implementasi Sistem Informasi Manajemen (SIMDA) terhadap pelaporan keuangan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Barat.

Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu : mengadakan penelitian langsung ke lapangan (Field Work Research), pada tahapan ini penulis membagi data menjadi dua yaitu: data primer dan data sekunder. Data primer adalah data berupa informasi langsung yang didapat dari subjek atau responden penelitian, sedangkan data sekunder adalah data yang sifatnya dokumentasi. Data primer didapatkan dari pejabat dan para staf pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Barat yang ditentukan sebagai responden penelitian. Data sekunder

berupa:

1. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
2. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2017.

Alat analisis yang digunakan untuk menganalisa data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis komparatif pengelolaan keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Barat dengan PP 58 Tahun 2005 dan analisis komparatif pelaporan keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Barat dengan PP 71 Tahun 2010 .

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Kesesuaian Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dalam melaksanakan Pengelolaan Keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Barat dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Analisis kesesuaian implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Barat adalah dengan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah. Dalam pasal 3 huruf a sampai dengan huruf s dijelaskan poin pengelolaan keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tersebut, dalam ringkasan sebagai berikut:

- a. asas umum pengelolaan kuangan daerah,
- b. pejabat-pejabat yang mengelola keuangan daerah,
- c. struktur APBD,
- d. penyusunan RKPD, KUA, PPAS, dan RKA-SKPD,
- e. penyusunan dan penetapan APDB,
- f. pelaksanaan dan perubahan APBD,'
- g. penatausahaan keuangan daerah,
- h. pertanggungjawaban pelaksanaan APBD,
- i. pengelolaan defisit dan penggunaan surplus APBD,
- j. pengelolaan kas umum daerah,
- k. pengelolaan piutang daerah,
- l. pengelolaan investasi daerah,

- m. pengelolaan barang milik daerah,
- n. pengelolaan dana cadangan,
- o. pengelolaan utang daerah,
- p. pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah,
- q. penyelesaian kerugian daerah,
- r. pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah, dan
- s. pengaturan pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan substansi pokok Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, diambil beberapa poin yang sesuai dengan tugas dan fungsi pengelolaan keuangan yang berada di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Barat. Hasil penelitian tentang kesesuaian pengelolaan keuangan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Barat dengan peraturan yang berlaku melalui Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 : Komparasi Pengelolaan Keuangan dengan PP No. 58 Tahun 2005

No.	Parameter Pengelolaan Keuangan PP No. 58 Thn 2005	Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Barat	Dokumen Pendukung
1.	asas umum pengelolaan kuangan daerah	dilaksanakan	laporan kinerja
2.	pejabat-pejabat yang mengelola keuangan daerah	dilaksanakan	laporan kinerja
3.	struktur APBD	dilaksanakan	laporan kinerja
4.	penyusunan RKPD, KUA, PPAS, dan RKA-SKPD	dilaksanakan	SIMDA
5.	penyusunan dan penetapan APBD	dilaksanakan	SIMDA
6.	pelaksanaan dan perubahan APBD	dilaksanakan	SIMDA
7.	penatausahaan keuangan daerah	dilaksanakan	SIMDA
8.	pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	dilaksanakan	SIMDA
9.	pengelolaan defisit dan penggunaan surplus APBD	tidak relevan	tidak ada
10.	pengelolaan kas umum daerah	dilaksanakan	SIMDA
11.	pengelolaan investasi daerah	tidak relevan	tidak ada
12.	pengelolaan barang milik daerah	dilaksanakan	daftar inventaris
13.	pengelolaan dana cadangan	tidak relevan	tidak ada
14.	pengelolaan utang daerah	dilaksanakan	SIMDA
15.	pembinaan dan pengawasan	dilaksanakan	SIMDA dan

No.	Parameter Pengelolaan Keuangan PP No. 58 Thn 2005	Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Barat	Dokumen Pendukung
	pengelolaan keuangan daerah		laporan kinerja
16.	penyelesaian kerugian daerah	tidak relevan	tidak ada
17.	pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah	tidak relevan	tidak ada
18.	pengaturan pengelolaan keuangan daerah	dilaksanakan	SIMDA dan laporan kinerja

Sumber: data diolah

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan metode penelusuran data dan bukti atas kesesuaian pengelolaan keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Barat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan, diperoleh hasil bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Barat telah melaksanakan pengelolaan keuangan sesuai dengan amanat undang-undang yang didukung dengan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) sebagai alat untuk membantu dalam pengelolaan keuangan baik dari penyusunan anggaran, sampai pada pertanggungjawaban kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dengan demikian hipotesis pengelolaan keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi belum sesuai dengan PP Nomor 58 Tahun 2005 adalah ditolak.

Analisis Kesesuaian Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dalam melaksanakan Pelaporan Keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Barat dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah

Analisis kesesuaian implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dalam melaksanakan pelaporan keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Barat dengan peraturan yang berlaku adalah diukur berdasarkan penyajian laporan keuangan yang dinilai berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Beberapa hal yang menjadi topik penilaian kesesuaian penyajian laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku adalah diukur berdasarkan hal berikut:

Tabel 3.2 : Komparasi Penyajian Laporan Keuangan dengan PP Nomor 71 Tahun 2010

No.	Parameter Penyajian Laporan Keuangan Berdasarkan PSAP (PP Nomor 71 Tahun 2010)	Laporan Keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Barat Tahun 2017	Dokumen Pendukung
1	Sesuai dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan, Lampiran I.01 Paragraf 60-83, Unsur Laporan Keuangan.	Unsur Laporan Keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi: a) Laporan Realisasi Anggaran b) Laporan Neraca c) Laporan Operasional d) Laporan Perubahan Ekuitas e) Laporan Arus Kas f) Catatan atas Laporan Keuangan	Laporan Keuangan Tahun 2017 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Barat.
2	Sesuai dengan Krangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan, Lampiran I.01 Paragraf 41 Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, dan Paragraf 98 Pengukuran Unsur Laporan Keuangan.	Kebijakan Akuntansi: Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan, dan Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Barat	Catatan atas Laporan Keuangan
3	Sesuai dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan, Lampiran I.01: a) Paragraf 61-62 b) Paragraf 78-79 c) Paragraf 96 d) Paragraf 97 e) Paragraf 68 f) Paragraf 68, dan PSAP No. 05 g) Paragraf 71, dan PSAP No. 07 h) Paragraf 73-76	Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan Pengakuan, pengukuran dan pengungkapan atas elemen laporan keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Barat: a) Kebijakan Akuntansi Pendapatan LRA b) Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO c) Kebijakan Akuntansi Beban d) Kebijakan Akuntansi Belanja e) Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas f) Kebijakan Akuntansi Persediaan g) Akuntansi Aset Tetap h) Akuntansi Kewajiban	Catatan atas Laporan Keuangan

Sumber: data diolah

Berdasarkan hasil dari penelitian tersebut, penyusunan laporan keuangan dengan menggunakan SIMDA pada SKPD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Barat adalah mengacu pada standar akuntansi yang berlaku, sehingga hipotesis laporan

keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Barat belum sesuai dengan PP 71 Tahun 2010 adalah ditolak.

Pembahasan

Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dalam melaksanakan Pengelolaan Keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Barat

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Barat dipimpin oleh Kepala Dinas, yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian otonomi daerah, Namun dari hasil pemeriksaan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Barat yang menyatakan beberapa koreksi dan saran terhadap ketidaksesuaian pelaksanaan dan pengelolaan kinerja dan keuangan (audit kinerja), Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Barat telah melaksanakan pengelolaan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku, meskipun terdapat beberapa hal yang harus dilakukan perbaikan terhadap metode dan kinerjanya.

Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah, yang dilaksanakan dengan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 sebagai berikut:

a. Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

Asas umum pengelolaan keuangan yang digunakan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Barat adalah memenuhi asas integrasi dan asas tanggungjawab. Asas terintegrasi adalah pengelolaan keuangan dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yaitu SIMDA dengan menjalankan bagian dari pengelolaan keuangan dari Kabupaten Kutai Barat yang dilimpahkan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam menangani sebagian otonomi daerah mengenai sekretariat, bidang pengembangan tenaga kerja, bidang hubungan industrial, dan bidang transmigrasi. Asas tanggungjawab meliputi pengelolaan keuangan yang tertib, taat terhadap peraturan perundang-undangan, efektif dan efisien, transparan, bertanggungjawab, adil, patut dan memberikan manfaat untuk masyarakat umum Kabupaten Kutai Barat.

b. Pejabat-Pejabat yang Mengelola Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan tidak lepas dari peran dan pembagian tugas satuan kerja pengelola keuangan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Barat, sesuai yang dijelaskan pada struktur dan tugas fungsi pokok masing-masing pengelola keuangan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Barat.

c. Struktur Anggaran

Anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi disusun oleh petugas anggaran dengan Sistem Informasi Manajemen Daerah secara terkomputerisasi yang terdiri dari anggaran pendapatan, anggaran belanja tidak langsung, anggaran belanja langsung meliputi program-program pelayanan administrasi, peningkatan saran dan prasarana, peningkatan sumber daya manusia aparatur, peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, program transmigrasi, perluasan dan pengembangan kesempatan kerja, peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, perlindungan dan pengembangan lembaga tenaga kerja.

d. Penyusunan RKPD, KUA, PPAS, dan RKA SKPD

Penyusunan rencana kerja dan anggaran dilaksanakan dalam Sistem Informasi Manajemen Daerah. Baik untuk satu tahun (KUA), ataupun RKA SKPD yang belum disetujui anggarannya oleh pihak Dinas Kabupaten Kutai Barat melalui DPRD, juga disusun dalam satu sistem informasi SIMDA.

e. Penyusunan Penetapan Anggaran

Penetapan anggaran disusun dan ditetapkan berdasarkan laporan hasil output SIMDA. Baik Rasentra, RKA SKPD, RKA Permendagri 59 dan 20, DPA SKPD, DPA Permendagri 59 dan 20 yang dapat disusun dalam satu menu anggaran SKPD pada SIMDA.

f. Pelaksanaan dan Perubahan Anggaran

Pelaksanaan perubahan anggaran jika ada, juga disusun melalui Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA), dengan persetujuan pihak yang berwenang, baik dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Barat kepada Dinas Kabupaten Kutai Barat.

g. Penatausahaan Keuangan Daerah

Tata usaha menjadi salah satu menu yang ada pada SIMDA dan memfasilitasi petugas tata usaha dalam mengelola tata usaha dan dokumentasi berkas-berkas terkait pengelolaan keuangan. SIMDA yang digunakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Barat telah difasilitasi format ekspor dan impor dokumen dalam kepentingan tata usaha. Baik SP3B, SP2B, serta arsip dokumen lain yang digunakan sebagai bagian alur dari pengelolaan anggaran pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Barat.

h. Pertanggungjawaban Anggaran

Pertanggungjawaban anggaran adalah terdiri dari pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran, yang seluruhnya difasilitasi menu pada SIMDA.

i. Pengelolaan Deficit dan Penggunaan Surplus Anggaran

Tidak dilaksanakan terhadap pengelolaan deficit ataupun surplus anggaran karena menjadi wewenang Kabuapten Kutai Barat.

j. Pengelolaan Kas Umum

Pengelolaan kas umum meliputi pengelolaan penerimaan yang dihandle oleh Bendahara Penerimaan. Menu SIMDA yang mendukung bendahara penerimaan dalam pengelolaan kas masuk adalah tanda bukti penerimaan, STS, buku rekapitulasi penerimaan, buku pembantu rincian penerimaan, SPJ pendapatan, buku kas penerimaan, register STS, register tanda bukti penerimaan, register ketetapan pendapatan, dan buku pendapatan harian, sebagai fasilitas pertanggungjawaban Bendahara kepada pimpinan dalam pengelolaan anggaran. Bendahara pengeluaran adalah bertanggungjawab dalam pengelolaan kas keluar dengan didukung fasilitas buku pajak, buku panjar, SPJ pengeluaran, Buku kas pengeluaran, Laporan SPJ dan rinciannya, SPP 1, 2, dan 3, S3 TU, Laporan pertanggungjawaban TUP, buku pembantu bank, buku pembantu kas tunai, buku belanja LS, dan bukti pengeluaran belanja, yang menjadi fasilitas bendahara pengeluaran dalam mempertanggungjawabkan tugasnya.

k. Pengelolaan Piutang

Pengelolaan piutang dilaksanakan sejalan dengan kebijakan akuntansi piutang yang berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan berdasarkan undang-undang yang berlaku.

l. Pengelolaan Investasi

Kebijakan pengelolaan investasi tidak dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Barat.

m. Pengelolaan Barang Hak Milik

Barang hak milik dikelola sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun berdasarkan temuan inspektorat perlu menjadi perhatian atas pemakaian inventaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Barat secara pribadi yang ditemukan dalam daftar inventaris yang berada pada laporan SIMDA, dengan fisik yang berada di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Hal ini mencerminkan selayaknya fasilitas pengelolaan barang hak milik telah bisa diinventarisir dengan baik dengan bantuan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA).

n. Pengelolaan Dana Cadangan

Pengelolaan dana cadangan tidak dilaksanakan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Barat.

o. Pengelolaan Utang

Pengelolaan utang dilaksanakan sejalan dengan kebijakan akuntansi utang yang berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan berdasarkan undang-undang yang berlaku.

p. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan

Pembinaan pengelolaan keuangan adalah termasuk dalam anggaran belanja yang berkaitan dengan pengembangan produktivitas aparatur. Pengawasan pengelolaan keuangan dikontrol oleh pimpinan melalui sistem SIMDA secara berkala.

q. Penyelesaian Kerugian

Penyelesaian kerugian tidak dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Barat karena menjadi tanggungjawab Kabupaten Kutai Barat.

r. Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

Pengelolaan keuangan badan layanan umum menjadi wewenang Pemerintah Kabupaten Kutai Barat.

s. Pengaturan Pengelolaan Keuangan

Pengaturan pengelolaan keuangan telah dijalankan berdasarkan peraturan yang berlaku, PP Nomo 58 Tahun 2005.

Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) sebagai software pembantu dalam pengelolaan keuangan telah diterapkan secara maksimal. Perlu dilakukan pengawasan terhadap penggunaan sistem tersebut oleh pimpinan sehingga pengelolaan keuangan dan pelaporan keuangan lebih memiliki akuntabilitas yang tinggi dan terhindar dari hal-hal yang menyimpang atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) pengelolaan keuangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Berdasarkan hasil analisa terhadap laporan hasil kinerja oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Barat yang menguji kesesuaian pengelolaan keuangan dan kinerja, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Barat telah melakukan pengelolaan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun masih terdapat beberapa hal yang harus terus diperbaiki karena tidak sesuai atau menyimpang dengan perundang-undangan yang berlaku.

Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dalam melaksanakan Pelaporan Keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Barat. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan laporan operasional, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas yang dinilai

kesesuaiannya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar Akuntansi Pemerintahan, sebagai Berikut:

1. Unsur Laporan Keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Barat terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Hal ini adalah sesuai dengan kerangka konseptual akuntansi pemerintahan yang menjadi isi dari Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan yang menyatakan dalam paragraph 60-63 Lampiran I. 01 tentang unsur laporan keuangan pemerintahan yang menyatakan demikian.
2. Kebijakan akuntansi yang diterapkan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Barat terdiri dari penggunaan basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, basis pengukuran nilai historis, sesuai dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan Lampiran 1.01 paragraf 41 tentang prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan, dan paragraph 98 tentang pengukuran unsur laporan keuangan.
3. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menerapkan pengakuan, pengukuran dan pengungkapan atas elemen laporan keuangan yang memuat kebijakan akuntansi pendapatan dalam laporan realisasi anggaran dan laporan operasional, kebijakan beban dan belanja, kebijakan kas setara kas, persediaan, akuntansi aset tetap, akuntansi kewajiban, yang seluruhnya berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Lampiran I.01 Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan paragraph 61-62, paragraph 78-79, paragraph 96, paragraph 97, paragraph 68 dan lampiran I.02 mengenai Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang membahas spesifik PSAP Nomor 05, 07, 09, dan lainnya tentang praktik pengakuan, pengukuran dan pengungkapan elemen laporan keuangan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Barat.

Berdasarkan hasil analisa terhadap laporan keuangan neraca dan laporan realisasi anggaran oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Barat Tahun 2017 dan menurut prinsip-prinsip dalam penyusunan laporan keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Barat telah menyajikan laporan keuangan tahun 2017 sesuai peraturan yang berlaku.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) sebagai *software* pembantu dalam pengelolaan keuangan telah diterapkan secara maksimal namun perlu dilakukan pengawasan terhadap penggunaan sistem tersebut oleh pimpinan sehingga pengelolaan keuangan dan pelaporan keuangan lebih memiliki akuntabilitas yang tinggi dan terhindar dari hal-hal yang menyimpang atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) pengelolaan keuangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Implementasi Sistem Informasi Daerah (SIMDA) sebagai *software* pembantu dalam pertanggungjawaban penyusunan laporan keuangan telah diterapkan secara maksimal sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Saran

Penelitian mengenai implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) diharapkan mendorong penelitian kualitatif berikutnya dengan paradigma yang berbeda. Pengungkapan informasi dan pengujian hasil output SIMDA telah disusun sesuai perundang-undangan yang berlaku, namun pengguna sistem tersebut harus selalu dikontrol dan dilakukan pengawasan agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terhindar dari penyimpangan dan praktik-praktik yang melanggar undang-undang.

REFERENCES

- Anonim. 2005. *Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- _____. 2010. *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Budiman, Fuad dan Arza, Fefri Indra. 2013. *Pendekatan Teknology Acceptance Model dalam Kesuksesan Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah*. Jurnal WRA, Vol.1 No 1 : 87-110.
- Erlina. 2008. *Metodologi Penelitian Bisnis: Untuk Akuntansi dan Manajemen*. Edisi Kedua. Medan: USU Press.
- Ismail. 2010. *Akuntansi Bank*. Jakarta :Penerbit Kencana.
- International Financial Standard Board*. 2016. *Handbook of International Public Sector Accounting Pronouncements*. New York:ISBN.978-1-60815-293-3.

- Machmud, Rizan. 2013. *Peranan Penerapan Sistem Informasi Manajemen terhadap Efektifitas Kerja Pegawai*. Jurnal Capacity STIE AMKOP Makassar. Vol.9 No.3
- Nordiawan dkk. 2007. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Suhayati, dkk. 2009. *Akuntansi Keuangan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.